



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

APBD DKI 2019 Diperkirakan Rp 87,3 Triliun

Alokasi Anggaran untuk Percepatan Program Multiyear

JAKARTA – Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2019 mulai dibahas. Usulan APBD 2019 dalam KUA-PPAS sebesar Rp87,3 triliun.

Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPT) DKI Saefullah mengatakan, usulan APBD 2019 dalam KUA-PPAS meningkat Rp4,1 triliun dari APBD 2018 sebesar Rp83,2 triliun menjadi Rp87,3 triliun. Nominal tersebut didapat dari hasil kajian dengan memperhatikan asumsi ekonomi makro terhadap pertumbuhan ekonomi di Jakarta, inflasi, termasuk nilai rupiah terhadap mata uang dolar.

"Pendapatan asli daerah, retribusi daerah, maupun pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau pendapatan lain-lain yang sah, kita berani di angka Rp77 triliun dari Rp65 triliun," ujar Saefullah dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta kemarin.

Saat pemaparan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BRD) banyak cara untuk mencapai target Rp77 triliun seperti menaikkan pajak kendaraan bermotor dari Rp8,9 miliar menjadi Rp9,9 miliar kemudian mengestimasi kendaraan baru dan pemunggal pajak yang sudah masuk hitungan.

Pendapatan tersebut akan dibelanjakan untuk berbagai macam kegiatan baik tidak langsung maupun langsung. Untuk kegiatan langsung itu bermacam-macam, ada penanggulangan banjir, rumah sewaan sederhana sewa (rusunawa), dan DP Nol Rupiah.

"Ada penyertaan modal juga pada perusahaan daerah/BUMD untuk meningkat-

kankesejahteraan masyarakat kita banyak program-program *multiyears*. Tahun ini *multiyears*-nya ada 20 program mulai dari rusunawa, DP Nol Rupiah, *underpass*, *flyover*, *basajir*, itu banyak yang kita gunakan *multiyears*, termasuk pembangunan RSUD," ungkap Soekda.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Subagyo merinci beberapa postur anggaran tambahan yang diprioritaskan dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2019 seperti peningkatan pendapatan yang bersumber dari 10 jenis pendapatan sejak pembahasan awal rancangan KUA-PPAS sebesar Rp77,78 triliun dari APBD Perubahan 2018 Rp68,50 triliun.

"Untuk postur pendapatan asli daerah tercatat Rp51,12 triliun, pajak daerah Rp44,18 triliun, retribusi daerah Rp710,13 miliar, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp5,53 triliun," ucapnya.

Dia juga menyebutkan postur dana perimbangan pada rancangan KUA-PPAS ditetapkan Rp23,50 triliun dengan perincian dana bagi hasil Rp20,05 triliun dan dana alokasi khusus nonfisik Rp3,45 triliun.

Untuk postur anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3,15 triliun. "Postur anggaran belanja daerah Rp73,68 triliun. Angka tersebut diperoleh dari pos belanja langsung Rp40,54 triliun dan belanja tidak langsung Rp33,13 triliun," ka-

ta Subagyo.

Pada postur pembiayaan rancangan KUA-PPAS sebesar Rp9,55 triliun beserta pos pengeluaran pembiayaan Rp13,65 triliun. Selain itu, postur penyerahan modal daerah akan diberikan kepada empat BUMD yakni PT MRT Jakarta Rp4,97 triliun untuk penyelesaian MRT fase 1 (Bundaran HI-Letak Bulus) dan pembangunan MRT fase 2 (Bundaran HI-Kampung Bandan). PT Jakarta Propertindo Rp648 miliar untuk pembebasan tanah program DP Nol Rupiah.

Kemudian, PT Pembangunan Sasana Jaya Rp1,80 triliun untuk pengadaan lahan proyek SPTA dan pembangunan hunian DP Nol Rupiah, PAM Jaya Rp385 miliar untuk optimalisasi *supply* DCR4, Cikokol, dan relokasi SPAM Ciandak.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, segala perencanaan anggaran yang dilakukan TAPT harus memberikan pemahaman secara komprehensif sebelum dibawa lebih lanjut dalam rapat lintas komisi DPRD.

Dia berharap aspek perencanaan dapat dilakukan secara akurat dan tahap pelaksanaan lelang sebisamungkin di awal tahun. "Kalau perlu untuk proyek-proyek besar bisa dilakukan skema tahun jamak atau lelang dini sehingga kendala penyerapan anggaran teratasi," ujar Sari, panggilan akrab Triwisaksana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, anggaran paling lambat disahkan 30 November 2018.

Dia menilai waktu pembahasan APBD kali ini sangat ketat mengingat banyak kegiatan di DPRD yang dilakukan secara bersamaan seperti riset, kunjungan kerja, serta bimbingan teknis. Meski demikian, dia memastikan pembahasan anggaran tetap harus diprioritaskan.

*** Bima Setiyadi**



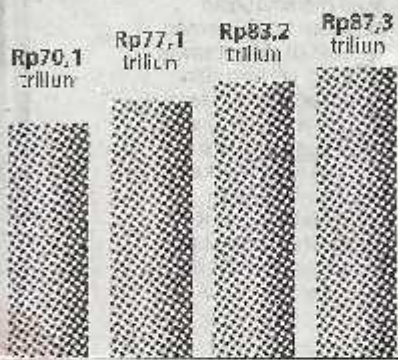
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

APBD DKI 2019 Diperkirakan Rp 87,3 Triliun

DANA MEMBANGUN JAKARTA

APBD 2019 diproyeksikan sebesar Rp87,3 triliun. Anggaran sebesar itu untuk percepatan proses pembangunan satu di antaranya infrastruktur transportasi.

Rencana APBD DKI Jakarta



Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019

- Pendapatan daerah 2019 ditargetkan Rp77,78 triliun
- Pendapatan daerah APBD Perubahan 2018 sebesar Rp65,8 triliun

PROJEKSI BELANJA DAN PENDAPATAN APBD 2019

PEMBANGUNAN MANUSIA

- Pengentasan kemiskinan yakni menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 1% dari 3,78% pada 2017 menjadi 2,78% pada 2022 melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan produktivitas masyarakat miskin.
- Peningkatan kualitas pendidikan baik di sekolah, madrasah, pesantren, maupun satuan pendidikan nonformal lainnya, termasuk menyelenggarakan guru dan tenaga pendidik, pemberian KIP Plus, tidak ada gedung sekolah rusak.
- Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan 100% Cakupan Pelayanan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage) dan mengembangkan layanan One Kelurahan Outstanding Care (OK OCARE).

PROJEKSI BELANJA DAN PENDAPATAN APBD 2019

Belanja Daerah: Rp71,16 triliun

- Belanja tidak langsung Rp30,65 triliun meliputi belanja pegawai Rp20,12 triliun, belanja bunga Rp50,52 miliar, belanja subsidi Rp4,21 triliun, belanja hibah Rp7,25 triliun, belanja bantuan sosial Rp4,17 triliun, belanja bantuan keluarga Rp271,78 miliar, dan belanja tidak terduga Rp152,83 miliar.
- Belanja langsung sebesar Rp40,51 triliun

Pengeluaran Pembiayaan: Rp5,94 triliun

- Penyediaan infrastruktur massal dalam rangka penanganan kemacetan
- Peningkatan beberapa proyek infrastruktur, khususnya sarana dan prasarana Asian Games 2018
- Pembayaran utang pekok

PENINGKATAN INTEGRITAS APARATUR

- Mendorong pencapaian opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WT²), pencapaian akuratahilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dengan predikat AA.

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR

- Peningkatan kewirausahaan dan kesempatan kerja melalui upaya menjadikan One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE) di 44 kecamatan sebagai penggerak utama wirausaha warga, mewujudkan 200.000 pewirusaha, dan 200.000 lapangan kerja.
- Peningkatan transportasi melalui pengintegrasian angkutan berbasis jalan dan air melalui skema One Karcis One Trip (OK Otrip), mengoperasikan MRT fase I (Lebak Bulus – Bundaran HI), dan membangun MRT fase II (Bundaran HI Kumpung Bandan), mengoperasikan LRT fase I (Kelapa Gading – Velodrome), mengoperasikan sistem jalan berbayar secara elektronik (ERP) pada empat koridor jalan arteri.

Sumber: Tempo, 20 Desember 2018, dan berbagai sumber